

Gugatan Kurator dalam Hal Pembatalan Lelang Eksekusi atas Hak Tanggungan Harta Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain- Lain/2023/PN Niaga Smg) = The Curator's Lawsuit regarding the Annulment of Auction Execution on Mortgage of Bankrupt Assets (Case Study of Semarang District Court Decision Number 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Smg)

Muhammad Subhan Alghifari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920566498&lokasi=lokal>

Abstrak

Pembahasan dalam skripsi ini adalah gugatan kurator dalam hal pembatalan lelang eksekusi atas hak tanggungan harta pailit, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/Pn Niaga Smg. Kurator memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, tetapi terdapat beberapa batasan dalam melakukan hal tersebut, salah satunya adalah hak kreditur untuk mengeksekusi haknya seolah tidak terjadi kepailitan sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU. Penelitian ini adalah penelitian Doktrinal Analitis yang memfokuskan pada doktrin yang merupakan sintesa atas aturan, norma, asas, panduan penafsiran, dan nilai. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kewenangan dan kedudukan kurator dalam mengajukan gugatan terhadap lelang eksekusi yang dilakukan kreditur pemegang hak tanggungan dan bagaimana analisis gugatan kurator pada Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/Pn. Niaga Smg. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa kurator memiliki kewenangan untuk melakukan gugatan lain-lain terhadap lelang eksekusi yang dilakukan oleh kreditur pemegang hak tanggungan kepada Pengadilan Niaga. Namun, gugatan kurator yang menyatakan bahwa keadaan insolvensi harta pailit berlaku sejak tanggal putusan pailit tidak tepat dikarenakan keadaan insolvensi harta pailit pada Justianto Eko Prasajo/CV. Sumber Baru (dalam pailit) dimulai sejak rapat pencocokan piutang dengan tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU.

.....The discussion in this thesis is the curator's lawsuit in terms of canceling the execution auction of the bankruptcy property mortgage, with a case study of the Semarang District Court Decision Number 15/Pdt.Sus-Other Lawsuits/2023/Pn Niaga Smg. The curator has the duty to manage and administer the bankruptcy estate, but there are several limitations in doing so, one of which is the right of creditors to execute their rights as if there was no bankruptcy in accordance with Article 55 paragraph (1) UUK-PKPU. This research is an Analytical Doctrinal research that focuses on doctrine which is a synthesis of rules, norms, principles, interpretive guidelines, and values. The subject matter of this research is how the authority and position of the curator in filing a lawsuit against the execution auction conducted by the creditor of the mortgage holder and how the analysis of the curator's lawsuit at the Semarang District Court Number 15/Pdt.Sus-Other Lawsuits/2023/Pn.Niaga Smg. In the end, the researcher concluded that the curator has the authority to file a lawsuit against the execution auction conducted by the creditor of the mortgage holder to the Commercial Court. However, the curator's claim stating that the insolvency of the bankruptcy estate applies from the date of the bankruptcy verdict is incorrect because the insolvency of the

bankruptcy estate of Justianto Eko Prasajo/CV. Sumber Baru (in bankruptcy) began at the receivables matching meeting with no peace plan offered, the peace plan offered was not accepted, or the ratification of peace was rejected based on a decision that has obtained permanent legal force in accordance with Article 178 paragraph (1) UUK-PKPU.